

**Analisis Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN)
dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Dinas Pendidikan
dengan Kegiatan Pemberian Fasilitas Sumbangan Pembinaan Pendidikan
(SPP) Siswa Miskin yang Bersekolah Swasta di Kota Semarang**

**Oleh:
Firmando Santoso^{*)}, Titik Djumiarti, Rihandoyo**

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman; <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRAK

Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin merupakan salah satu bentuk pemanfaatan *electronic government*. Penerapan Sistem Informasi Keluarga Miskin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang membutuhkan antara lain: anggaran, sarana prasarana/ketersediaan teknologi, pengelolaan sumber daya manusia dan integrasi antar instansi lainnya. Dinas Pendidikan merupakan salah satu pengguna Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin untuk proses pengambilan keputusan. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi pengembangan SIMGAKIN dan proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIMGAKIN berpengaruh pada tahapan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian fasilitas SPP siswa miskin yang bersekolah swasta. terkait pengelolaan SIMGAKIN yaitu, berorientasi kepada keputusan, ketersediaan teknologi, pengelolaan sumber daya manusia, sistem komunikasi, dan integrasi, sedangkan pengambilan keputusan yaitu pemahaman, perencanaan atau perancangan, dan pemilihan. Berorientasi kepada keputusan di SIMGAKIN telah dilaksanakannya pelayanan pendataan warga miskin yang cepat dan akurat. Ketersediaan teknologi dalam penerapannya meliputi database, perangkat keras, perangkat lunak, dan operator yang kurang terpenuhi. Pelatihan dan pengembangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pegawai dalam pelaksanaan SIMGAKIN sudah diselenggarakan. Untuk sistem komunikasi sudah terlaksana dengan baik. Terakhir integrasi Bappeda dengan instansi lainnya dapat dilihat dari kerjasama dan perencanaan yang terprogram. Sedangkan proses pemahaman, perencanaan atau perancangan, dan pemilihan sudah memanfaatkan SIMGAKIN, tetapi kegiatannya merupakan kegiatan lama. Disarankan pelayanan pendataan warga miskin perlu ditingkatkan lagi. Adanya penyempurnaan aplikasi SIMGAKIN. Peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai. Pengambilan keputusan dengan pemilihan kegiatan baru untuk memaksimalkan fungsi dan peran SIMGAKIN.

Kata kunci : sistem informasi manajemen, sistem informasi manajemen keluarga miskin, pengambilan keputusan

^{*)}Penulis korespondensi
Email: 060194santoso@gmail.com

The Analysis Of Management Information System Poor Family (SIMGAKIN) In The Process Of Decision-Making Policy Department Of Education By Giving SPP Facilities To Needy Students At Private School In Semarang City

Oleh:
Firmando Santoso^{*}, Titi Djumiarti, Rihandoyo

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman; <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The analysis of management information System Poor Family (SIMGAKIN) is one form of utilization of electronic governance. The application of SIMGAKIN in Local Development Planning Agency (Bappeda) at Semarang city, needed budgets, facilities and infrastructure/availability of technology, human resource management, and integration among other institution. Departement of Education is one user of SIMGAKIN for decision-making process. Research methodology descriptive with a qualitative approach used in this research to identify the development of SIMGAKIN and decision-making process. The result of the research showed that influence the stage of decision making in the implementation of activities by giving SPP facilities to needy students, related to the management of SIMGAKIN, that is oriented to decision, availability of technology, human resource management, communication systems, and integration, while in the decision-making is comprehension, planning or design, and selection. Oriented to decision of the SIMGAKIN, have been applied poor data collection service that's fast and accurate. Availability of technology to apply database, hardware, software, branware is still inadequate. In the implementation of SIMGAKIN Has been applied Training and development in accordance with the main main task and fungtion employees. Communication system has been well-executed. Integration of BAPPEDA with other institutions, can be seen from the cooperation and planning programmed. Therefore comprehension, planning or design, and selection has been exploit the SIMGAKIN but still uses a long of activities. Based on the result this research recommends, need to be improve of poor data collection. Need to be improved SIMGAKIN application. Improving the quality and quantity of employees. Decision making by the selection new activities to maximize the fungtion and role of SIMGAKIN.

Keyword : *Management Information System, management information System Poor Family, decision makking*

^{*}Penulis Korespondensi
Email: 060194santoso@gmail.com

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mewujudkan *Good Governance* berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang hak, kewajiban, dan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri termasuk pemerintahan.

Pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat merupakan tujuan dari *Good Governance*, sehingga beberapa pemerintah daerah menggunakan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam memberikan layanan.

Salah satu sumber daya yang cukup penting dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) yaitu informasi dan data, yang nantinya dapat diakses oleh masyarakat dan dapat membantu para perumus kebijakan untuk pengambilan keputusan baik jangka panjang, menengah dan jangka pendek.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang merupakan salah satu instansi yang memberdayakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga miskin dengan menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN).

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) atau database warga miskin terpadu bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai data warga miskin dan mensukseskan program penanggulangan kemiskinan pemerintah Kota Semarang, sehingga

dapat meningkatkan perekonomian dan menyejahterahkan masyarakat.

Pada pelaksanaan pendataan warga miskin dengan menggunakan teknologi informasi melalui Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) di Bappeda masih memiliki permasalahan antara lain: mengenai kurang memadainya perangkat keras (*hardware*) untuk mengelola *website*.

Permasalahan selanjutnya yaitu kurangnya operator (*brainware*) yang bertugas untuk mengoperasikan *website* SIMGAKIN, dikarenakan tidak adanya staf di Bappeda yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang IT.

Selain itu permasalahan tentang sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pendataan warga miskin yang telah menggunakan sistem online, belum juga terlaksana dengan baik terutama pada tata cara pendaftaran, informasi mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran, serta jadwal pelaksanaan verifikasi dan identifikasi.

Terakhir yaitu permasalahan mengenai sulitnya membangun integrasi yang baik antar SKPD, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan, sehingga Bappeda dituntut untuk dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens, dengan demikian kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar..

Salah satu fungsi dari dilaksanakannya Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) yaitu untuk mempermudah setiap dinas/instansi

dalam pengambilan keputusan yang berbentuk kegiatan/program, sehingga dapat mensukseskan program penanggulangan kemiskinan pemerintah Kota Semarang.

Dinas Pendidikan Kota Semarang merupakan salah satu instansi yang menggunakan *website* SIMGAKIN untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tersebut di imlementasikan dalam kegiatan-kegiatan pemberian bantuan untuk menanggulangi kemiskinan di bidang pendidikan.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan yaitu pemberian fasilitasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) untuk siswa miskin yang bersekolah swasta di Kota Semarang. Namun kegiatan tersebut memiliki permasalahan yaitu masih diperbolehkannya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk memperoleh bantuan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang peranan Kartu Identitas Miskin (KIM) yang telah diberikan oleh pemerintah daerah untuk warga miskin yang tercantum pada database.

Berdasarkan uraian permasalahan yang ada, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) Dalam Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan Dinas Pendidikan Dengan Kegiatan Pemberian Fasilitasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Siswa Miskin yang Bersekolah Swasta Di Kota Semarang”**

B. TUJUAN

1. Untuk mengetahui pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Dinas Pendidikan dengan pemberian fasilitas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa miskin yang bersekolah swasta di Kota Semarang.

C. TEORI

Menurut Gordon B.Davis dalam bukunya yang berjudul *“Management Information System: Conceptual Foundation, Struktur and Development”* mendefinisikan SIM adalah sistem manusia/mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen dan pengambilan keputusan didalam suatu organisasi (Sutabri, 2005: 91)

Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) di Bappeda Kota Semarang di lihat melalui lima unsur pendekatan dalam pengembangan sistem informasi manajemen menurut Moekijat (2005: 104) yaitu:

1. Berorientasi Kepada Keputusan
2. Ketersediaan Teknologi
3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Sistem Komunikasi
5. Integrasi

Menurut Salusu (2005: 47) mengatakan bahwa pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Sehingga proses pengambilan keputusan di Dinas Pendidikan pada kegiatan Pemberian Fasilitas SPP untuk siswa/siswi miskin yang bersekolah swasta di Kota Semarang yang dihubungkan dengan SIMGAKIN di lihat melalui tiga tahap proses bantuan SIM untuk pengambilan keputusan-keputusan menurut Moekijat (2005: 192) yaitu:

1. Pemahaman
2. Perencanaan/perancangan
3. Pemilihan

D. METODE

1. Desain dan Jenis Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, maupun tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui terjadinya suatu aspek fenomena tertentu (Singarimbun dan Effendi, 1989: 4-5).

2. Situs dan Fokus

Penelitian ini lebih menitik beratkan pada fokus mengenai Analisis pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) dan proses

pengambilan keputusan dengan kegiatan pemberian fasilitas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa miskin yang bersekolah swasta. Situs pada penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Semarang dan Dinas Pendidikan Kota Semarang

3. Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sample* yaitu memilih informan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Adapun *Key Informan* dalam penelitian ini adalah:

- Bappeda Kota Semarang:
 1. Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
 2. Kepala Kasi Sub Bidang Sosial Budaya
 3. Staf Bidang Sosial Budaya
- Dinas Pendidikan Kota Semarang:
 4. Kasi Sub Bidang Monitoring dan Pengembangan
 5. Kasi Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan
 6. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

4. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) dalam buku Moleong (2010: 157-160) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sedangkan jenis data dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis dan foto.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh (Arikunto, 2002: 107). Sedangkan sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis :

1. Data Primer
2. Data Sekunder

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, meliputi:

1. Wawancara Mendalam,
2. Observasi, dan
3. Dokumentasi

6. Analisa dan Interpretasi Data

Analisa data adalah pengelolaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Alur-alur dalam analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

7. Kualitas Data

Tahap pengujian kualitas data, metode yang digunakan adalah metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Penggunaan tringulasi dalam penelitian ini dapat *me-recheck* hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori dengan dapat dilakukan dengan jalan:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan

2. Mengecek dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

E. PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang beserta peranannya dalam proses pengambilan keputusan kebijakan Dinas Pendidikan dengan kegiatan pemberian fasilitasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa miskin yang bersekolah swasta di Kota Semarang dilihat melalui lima unsur pendekatan dalam pengembangan sistem informasi manajemen yang dikaitkan dengan tiga tahap proses bantuan SIM untuk pengambilan keputusan-keputusan menurut Moekijat, antara lain:

1. Berorientasi Kepada Keputusan

1.1 Dukungan *website* SIMGAKIN dalam pencapaian visi dan misi

Website Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) telah mendukung visi dan misi pemerintah Kota Semarang yaitu dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas khususnya untuk pendataan warga miskin.

Hal tersebut dibuktikan dengan masyarakat, instansi pemerintah dan *stakeholder* dapat mengakses data warga miskin secara bebas dan kapan saja.

Selain itu dukungan *website* terhadap visi dan misi dapat mempermudah proses

pengambilan keputusan yaitu pada tahap pemahaman. Dimana Dinas Pendidikan telah memanfaatkan SIMGAKIN dalam menemukan masalah-masalah pendidikan.

Salah satu permasalahan yang dihadapi yaitu adanya warga miskin yang belum tercantum pada SIMGAKIN, sehingga menyebabkan putra/putri dari warga miskin tersebut tidak dapat menerima program/kegiatan bantuan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan.

1.2 Bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin

Bentuk komitmen pimpinan Bappeda dalam mendukung pelaksanaan SIMGAKIN yaitu 1). memberikan anggaran untuk pembuatan dan pemeliharaan *website*, 2). menyediakan database keluarga miskin yang di update setiap dua tahun sekali dengan kegiatan validasi dan verifikasi, 3). target penurunan kemiskinan 2% pertahun.

Berdasarkan hal di atas bentuk komitmen dalam pelaksanaan SIMGAKIN juga berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan yaitu pada tahap pemahaman.

Bahwa dengan adanya komitmen tersebut membuat dinas pendidikan selalu meningkatkan kinerjanya dalam membantu siswa miskin agar tetap bersekolah, sehingga diharapkan kedepannya dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarganya dan

tercapainya target penurunan persentase keluarga miskin.

1.3 Pelayanan yang diberikan sebelum dan sesudah dibuat Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin

Adanya perbedaan pelayanan yang diberikan pada pelaksanaan SIMGAKIN yaitu sebelum adanya SIMGAKIN pelayanan pendaftaran warga miskin masih bersifat manual, sedangkan sesudahnya pelayanan pendataan yang diberikan pemerintah lebih cepat.

Hal tersebut dibuktikan dengan pada sebelum adanya SIMGAKIN masyarakat harus mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) melalui proses administrasi yang panjang dan waktu yang lama, tetapi setelah adanya SIMGAKIN pendataan warga miskin dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, setelah itu pemerintah memberikan Kartu Identitas Miskin (KIM) bagi setiap warga miskin yang telah ditetapkan dan terdaftar pada database oleh pemerintah.

Hal tersebut berpengaruh terhadap tahap pemahaman dalam proses pengambilan keputusan. Dimana Dinas Pendidikan sebelum adanya SIMGAKIN siswa/siswi miskin yang bersekolah untuk memperoleh pelayanan kegiatan bantuan perlu menggunakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu).

Setelah adanya pelaksanaan SIMGAKIN prosedur untuk mendapatkan pelayanan bantuan

lebih dipermudah hanya dengan menyertakan Kartu Identitas Miskin (KIM) yang telah diberikan pemerintah kota kepada warga miskin yang telah tercantum pada sistem database.

1.4 Kemampuan intervensi pimpinan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Intervensi yang dilakukan kepala Bappeda kepada para stafnya yaitu dengan memberikan motivasi agar lebih mengembangkan SIMGAKIN, dengan cara antara lain memberikan akses penuh dalam berkoordinasi kepada dinas/instansi dalam menjalankan program pendataan warga miskin secara terpadu.

Intervensi yang dilakukan pimpinan Bappeda berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan pada tahap pemahaman. Dimana dengan adanya koordinasi yang baik membuat Dinas Pendidikan dalam melaksanakan program/kegiatannya lebih mudah mengakses data dan kebutuhan siswa/siswi miskin yang akan dijadikan sasaran dalam pengentasan kemiskinan.

2. Ketersediaan Teknologi

2.1 Konsep database yang dibangun

Konsep database dalam pelaksanaan SIMGAKIN yaitu konsep satu data dengan penyusunan data warga miskin berdasarkan *by name, by address, by* Kartu Keluarga (KK) dan *by* variabel, yang nantinya diharapkan dengan penyusunan

tersebut sasaran dan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan maksimal.

Konsep database memberikan kemudahan pada proses pengambilan keputusan di tahapan perencanaan/perancangan. Pemanfaatan dari database sebagai penyedia data, oleh dinas pendidikan digunakan pada empat program/kegiatan bantuan. Kegiatan tersebut antara lain : 1) Beasiswa, 2) Pendampingan BOS pengganti SPP, 3) Penerimaan Peserta Didik (PPD) dan 4) *live skill* dimana setiap kegiatan SIMGAKIN dipergunakan sebagai acuan data.

2.2 Tingkatan software dalam menjalankan program

Penggunaan *software* dalam pelaksanaan sistem informasi manajemen keluarga miskin (SIMGAKIN) bersifat mudah, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan SDM tentang teknologi sehingga aplikasi yang diterapkan dengan berbasis *web (Web Based Application)* yang merupakan segala bentuk aplikasi (*grafis, word processor, chatting, mail*) yang dapat dijalankan hanya dengan satu syarat, yakni memiliki akses internet.

Software yang digunakan dengan berbasis *website* diharapkan dapat memberikan kemudahan pada proses pengambilan keputusan di tahap perencanaan/perancangan.

Adanya *software* tersebut Dinas Pendidikan dapat memberikan pelayanan lebih cepat dikarenakan dengan adanya data yang dapat diakses secara *online* menjadikan perancangan

untuk prosedur siswa/siswi dalam mendapatkan pelayanan bantuan lebih mudah.

2.3 Ketersediaan peralatan fisik (*hardware*) yang digunakan sebagai media pendukung penyimpanan data

Pelaksanaan sistem informasi manajemen keluarga miskin (SIMGAKIN) masih minim dalam sarana prasarana teknologi (*hardware*) sehingga hal tersebut diatasi melalui kerjasama yang dibangun dengan kantor Humas dan PDE dalam pelaksanaannya, hal ini dikarenakan Kantor PDE memiliki *hardware* yang sangat mendukung untuk mengoptimalkan dalam pelaksanaan SIMGAKIN.

Ketersediaan *hardware* berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan/perancangan. Adanya kerjasama yang dilakukan membuat data warga miskin menjadi lebih baik.

Dinas Pendidikan dapat mengetahui kebutuhan dari siswa/siswi miskin. Setelah mengetahui kebutuhan tersebut dinas pendidikan dapat membuat beberapa alternatif perencanaan kegiatan yang akan diselenggarakan guna menunjang pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

2.4 Ketersediaan sumber daya manusia (operator) dalam menjalankan program

Ketersediaan operator (*brainware*) masih dikatakan belum tercukupi dalam pelaksanaan Sistem Informasi

Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) dikarenakan Bappeda Kota Semarang masih belum adanya operator yang professional atau mengetahui dalam bidang IT, sehingga untuk menjalankan, mengelola, dan mengembangkannya Bappeda bekerjasama dengan pihak ketiga, selain itu bekerjasama juga dengan Kantor PDE dalam membantu mengentry dan menganalisis data warga miskin yang nantinya di masukkan ke dalam database.

Ketersediaan operator berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan/perancangan. Bappeda menunjuk operator di setiap dinas yang memberdayakan SIMGAKIN dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Salah satunya berada di Dinas Pendidikan dengan tujuan agar operator tersebut dapat membantu setiap kepala bidang di dinas pendidikan dalam mengakses dan mengetahui data warga miskin terbaru agar dapat dijadikan acuan dalam membuat perencanaan/ perancangan dengan bentuk kegiatan/program bantuan.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

3.1 Pengrekrutan SDM untuk meningkatkan pelaksanaan program

Pada pelaksanaan sistem informasi manajemen keluarga miskin (SIMGAKIN) tidak adanya pengrekrutan SDM. Hal ini

dikarenakan adanya moratorium yang terjadi, selain itu perekrutan SDM dilakukan oleh pihak yang memiliki tupoksi tersebut yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melalui tes CPNS. Bappeda hanya mensyaratkan, SDM yang direkrut harus ahli dibing IT, berkinerja tinggi, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan.

Perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan pada tahap pemilihan.

Perekrutan yang dilakukan oleh Bappeda dengan membuat tim yang salah satunya berasal dari Dinas Pendidikan, diharapkan nantinya dapat membantu dalam memilih program/kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan kemiskinan di *website* SIMGAKIN.

3.2 Program pelatihan yang diberikan pada Sumber daya manusia

Program pelatihan untuk pegawai telah dilakukan oleh Bappeda setiap setahun sekali dengan tujuan untuk memperbaiki efektivitas kerja pegawai dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan terutama dalam mengelola dan mengembangkan *website* SIMGAKIN.

Program pelatihan berpengaruh terhadap proses

pengambilan keputusan pada tahap pemilihan. Bappeda memberikan kesempatan kepada staf di Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pihak ketiga untuk memahami setiap fitur pada *website* SIMGAKIN,

Diharapkan nantinya Dinas Pendidikan dapat mengambil keputusan dan melaporkan hasil capaian dari pelaksanaan pemberian fasilitas Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa miskin yang bersekolah swasta.

3.3 Perbaikan kondisi kerja yang dilakukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten

Telah dilakukannya perbaikan kondisi kerja oleh Bappeda dengan cara penerapan subsistem kompensasi untuk menjadikan SDM yang direkrut melalui pembentukan tim agar lebih meningkatkan kinerjanya dan juga dengan syarat kompensasi akan didapatkan apabila SDM tersebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan regulasi yang mengatur.

Perbaikan kondisi kerja yang dilakukan oleh Bappeda berpengaruh pada proses pengambilan keputusan di

tahap pemilihan. Kegiatan pemberian fasilitas SPP untuk siswa miskin yang dipilih Dinas Pendidikan merupakan program yang telah dijalankan sebelum diterapkannya program SIMGAKIN dan masih menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Kemudian setelah adanya SIMGAKIN Dinas Pendidikan melakukan perbaikan kondisi kerja dalam membantu siswa miskin dengan cara mengintegrasikan data siswa/siswi miskin yang akan dijadikan sasaran dalam kegiatan dengan menggunakan KIM (Kartu Identitas Miskin).

4. Sistem Komunikasi

4.1 Sosialisasi yang dilakukan kepada seluruh kalangan birokrat dan masyarakat secara umum

Pada Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin Bappeda telah melakukan sosialisasi, baik itu kepada masyarakat maupun birokrat dengan kurun waktu setiap satu atau dua tahun sekali selalu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, dan untuk birokrat dilakukan sosialisasi pada saat *laucing* database warga miskin terbaru.

4.2 Transmisi data menunjukkan proses kecepatan pengiriman data keluarga miskin kepada dinas-dinas atau organisasi publik

Transmisi data dalam pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin telah dilakukan dengan cepat dengan cara Bappeda memberikan satu *user* beserta dengan *password*, karena *software* yang digunakan adalah berbasis *website*, sehingga untuk mengaksesnya membutuhkan *by login*.

Selain itu Bappeda juga memberikan CD dan buku yang berisikan data warga miskin yang merupakan duplikat dari database. Buku dan CD dapat dipergunakan oleh setiap dinas/ instansi ketika adanya masalah pada *website* SIMGAKIN.

4.3 Media komunikasi yang digunakan dalam SIMGAKIN

Media Komunikasi pada pelaksanaan website Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) telah tersedia sehingga adanya media komunikasi bagi masyarakat untuk berkomunikasi dengan penyelenggara menjadi.

Hal yang penting untuk menumbuhkan komunikasi dua arah yang menjadi standar dalam pemberian layanan informasi data secara elektronik. Media yang

tersedia diberikan pada saat proses uji publik, sehingga masyarakat dapat memberikan kritik/saran dan saran terkait dengan data warga miskin yang akan dimasukkan kedalam database.

4.4 Ketersediaan jaringan internet untuk online dalam penerapan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin

Ketersediaan jaringan internet pada pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) belum memenuhi dikarenakan *software* yang berbasis *web* merupakan jaringan komputer yang mencangkup wilayah sangat luas atau masyarakat dari semua kalangan dapat mengaksesnya.

Hal tersebut akhirnya menimbulkan ketidakstabilan pada situasi tertentu, seperti pada saat adanya kegiatan bantuan yang diberikan oleh pemerintah jaringan internet di Bappeda kurang memenuhi tetapi ketika tidak adanya bantuan maka jaringan internet di Bappeda sudah cukup memenuhi.

5. Integrasi

5.1 Perencanaan volume atau kapasitas informasi data pada *website*

Perencanaan volume untuk memenuhi kapasitas data pada website

SIMGAKIN telah memenuhi dikarenakan Bappeda sebagai penyelenggara telah melakukan kerjasama dengan Kantor Humas dan PDE untuk memenuhi kebutuhan kapasitas data yang akan ditetapkan menjadi data warga miskin Kota Semarang, selain itu perencanaan kapasitas tergantung dari hasil verifikasi dan identifikasi yang dilaksanakan.

5.2 Perencanaan kerjasama antar SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan SIMGAKIN

Pada Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN), Bappeda telah melakukan perencanaan kerjasama melalui berkoordinasi dengan dinas/instansi yang menyelenggarakan program penanggulangan kemiskinan. Cara yang dilakukan Bappeda untuk berkoordinasi adalah dengan membuat tim-tim yang beranggotakan pegawai dari setiap dinas/instansi.

Adapun tim-tim yang dibentuk Bappeda dalam pelaksanaan SIMGAKIN: tim aplikasi, tim koordinasi pelaksana, tim koordinator suveyor, tim monitoring, tim pelaksana kegiatan, tim penyusun laporan, tim pra identifikasi, tim surveyor, dan tim teknis.

5.3 Waktu respon yang diberikan mengenai data keluarga miskin baru

Waktu respon dalam pelaksanaan SIMGAKIN yang dijadikan acuan untuk program pemerintah kota untuk penanggulangan kemiskinan adalah sekitar dua sampai tiga bulan tergantung dari banyaknya usulan warga miskin yang diberikan oleh kecamatan. Pendataan warga miskin yang menggunakan metode survei langsung kelapangan dengan menggunakan kuesioner, sehingga membutuhkan waktu respon yang panjang.

5.4 Pemantauan jaringan untuk memastikan bahwa jaringan tetap pada tingkat operasi yang diinginkan

Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) pemantauan jaringan pada setiap tahunnya dilakukan setiap tiga bulan sekali sesuai dengan SOP (Standar Oprasional) yang telah di tetapkan, tetapi adanya perubahan pada tahun 2015 mengenai pemantuan jaringan yang dilakukan setiap hari oleh Kantor Humas dan PDE.

F. PENUTUP KESIMPULAN

Pelaksanaan SIMGAKIN di Bappeda Kota Semarang yang kurang maksimal dilihat dari lima unsur pendekatan pengembangan

SIM, berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang maksimal.

Salah satunya di Dinas Pendidikan Kota Semarang yaitu pengambilan keputusan tentang bantuan beasiswa miskin yang masih menggunakan kegiatan lama atau kegiatan yang dilakukan sebelum adanya SIMGAKIN. Kegiatan tersebut adalah pemberian fasilitas SPP siswa miskin yang bersekolah swasta yang dapat dilihat dari tiga tahapan pengambilan keputusan dengan pemberdayaan sistem informasi manajemen keluarga miskin (SIMGAKIN).

a. Berorientasi Kepada Keputusan

Dimulai dari pelaksanaan *website* SIMGAKIN yang berorientasi kepada keputusan, dimana SIMGAKIN dapat mendukung visi dan misi Kota Semarang, selain itu komitmen seorang kepala Bappeda Kota Semarang sudah dapat dibuktikan melalui strategi-strategi.

Pelaksanaan SIMGAKIN membuat adanya perbedaan layanan yang diberikan kepada warga miskin lebih cepat dan tepat, yang dapat dilihat dari metode, prosedur, dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan.

Terakhir adanya intervensi yang dilakukan oleh pimpinan Bappeda kepada para staf yang dibuktikan dengan setiap program harus dilakukan bersama-sama sesuai dengan tugas pokok, memberikan motivasi kepada para pegawai, memberikan akses yang mudah

untuk berkoordinasi kepada setiap SKPD.

Oleh karena itu, dinas pendidikan Kota Semarang telah mampu memahami permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan, dengan memanfaatkan *website* SIMGAKIN sehingga penerapannya sudah sesuai dengan proses pengambilan keputusan pada tahap pemahaman

b. Ketersediaan teknologi

Unsur ke dua ini dapat dilihat masih minimnya ketersediaan teknologi pada pelaksanaan SIMGAKIN. Dimana konsep database yang dibuat yaitu dengan konsep satu data yang dapat digunakan oleh setiap SKPD, kemudian untuk perangkat lunak dibuat paling mudah.

Selain itu sama halnya dengan ketersediaan perangkat keras juga masih kurang memenuhi untuk pengelolaan. Kekurangan tersebut dikarenakan belum tersedianya SDM yang professional dalam bidang TI (Teknologi Informasi) atau tidak adanya operator (*brainware*).

Ketersediaan teknologi di Bappeda yang masih kurang memadai membuat proses pengambilan keputusan di Dinas Pendidikan pada tahap perencanaan/perancangan juga kurang maksimal.

c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pada unsur yang ketiga tentang pengelolaan sumber daya

manusia dalam pelaksanaan SIMGAKIN masih kurang, hal ini disebabkan karena adanya moratorium sehingga tidak adanya pengrekrutan pegawai oleh Bappeda Kota Semarang.

Sedangkan untuk pelatihan yang diberikan Bappeda dalam pelaksanaan SIMGAKIN dilakukan setiap tahunnya yang bekerjasama dengan pihak ketiga dan lembaga pendidikan, terakhir Bappeda melakukan perbaikan kondisi kerja dengan melakukan pemberian honor tambahan atau kompensasi untuk pegawai yang melaksanakan tugas.

Pengelolaan sumber daya manusia yang minim membuat proses pengambilan keputusan pada tahap pemilihan menjadi kurang maksimal. Dinas Pendidikan pada tahapan terakhir ini kegiatan yang dipilih dengan memberdayakan SIMGAKIN yaitu dengan adanya kegiatan Pemberian fasilitas SPP untuk siswa miskin yang bersekolah swasta di Kota Semarang, tetapi kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum adanya program SIMGAKIN.

d. Sistem Komunikasi

Unsur yang keempat adalah sistem komunikasi telah dilaksanakan dengan maksimal dan tidak adanya kendala yang berarti, seperti sosialisasi SIMGAKIN yang diberikan satu hingga dua tahun sekali.

Data SIMGAKIN diterima oleh penerima diperlukan suatu medium untuk mengirimnya, maka Bappeda memberikan satu

user beserta dengan *password* untuk setiap SKPD yang memiliki program untuk penanggulangan kemiskinan, selain itu telah tersedianya media komunikasi pada website SIMGAKIN yang bertujuan agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dengan cara memberikan kritik/saran melalui menu pengaduan.

e. Integrasi

Unsur terakhir atau unsur kelima dalam pelaksanaan SIMGAKIN yaitu sudah adanya integrasi yang dibangun dengan baik. Dimana pada perencanaan kapasitas data warga miskin yang akan dimasukkan kedalam database, Bappeda bekerjasama dengan Kantor PDE.

Selain itu Bappeda juga melakukan perencanaan kerjasama dengan membangun koordinasi pada setiap SKPD yang merupakan lembaga teknis untuk menjalankan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Setelah hal tersebut terkait waktu respon data pada pendataan warga miskin terbaru pada pelaksanaan verifikasi dan identifikasi untuk mengupdate data warga miskin memerlukan waktu antara dua sampai tiga bulan dan hal terakhir, Bappeda bekerjasama dengan Kantor Humas dan PDE dalam prosesnya pemantauan jaringan yang dilakukan sesuai dengan SOP yaitu sekitar tiga bulan sekali tetapi pada tahun 2015 dilakukan pemantuan setiap hari agar semua kendala-kendala yang

terjadi dapat diatasi dengan cepat.

SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini tentang pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Keluarga Miskin (SIMGAKIN) dan proses pengambilan keputusan dengan kegiatan pemberian fasilitasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa miskin yang berskolah swasta di Kota Semarang dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Berorientasi Kepada Keputusan

Pelaksanaan SIMGAKIN perlu ditata dengan sebaik-baiknya seperti prosedur yang perlu diterapkan oleh setiap dinas yang ikut serta dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, sehingga dapat mempermudah warga miskin dalam memperoleh bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik itu pemerintah pusat atau daerah.

2. Sistem Komunikasi

SIMGAKIN merupakan pendataan warga miskin secara terpadu sehingga perlu adanya sosialisai kepada masyarakat baik dari Bappeda dan dinas yang terkait tentang pelaksanaan SIMGAKIN dan kegiatan yang menggunakan SIMGAKIN. Selain itu terkait dengan adanya fitur komunikasi pada *website* SIMGAKIN bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan/kritik/saran maka dengan pemanfaatan teknologi informasi seharusnya

keluhan/kritik/saran tersebut dapat didisposisikan melalui sistem online kepada dinas/instansi yang berwenang

3. Ketersediaan Teknologi

- **software**

Amplikasi SIMGAKIN yang menggunakan *software* berbasis *website*, tetapi kurangnya ketersediaan jaringan internet sehingga mengakibatkan sulitnya dalam meng-*upload* data, grafik dan foto terbaru kedalam fitur-fitur di *website*. Maka Bappeda perlu menambahkan kapisatas jaringan internet agar pengelolaan SIMGAKIN dapat terus berkembang.

- **Hardware**

Bagian-bagian pokok dalam *hardware* terdiri dari input, proses dan output. Input dalam SIMGAKIN berbentuk kuesioner sehingga baiknya Bappeda perlu melaksanakan pendataan warga miskin secara online dan terintegrasi dengan SIMPENDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) dengan demikian Bappeda dapat memperoleh data secara cepat dan akurat.

Proses sebaiknya Bappeda perlu menambahkan beberapa unit komputer terbaru agar dapat meningkatkan kinerja para pegawai, dan terakhir untuk output sebaiknya Bappeda tidak perlu memberikan buku dan CD yang sifatnya mudah rusak tetapi dapat digantikan dengan *harddisk* eksternal yang memiliki sifat fleksibel dan memiliki kapasitas data yang besar.

- **operator (brainware)**

Jumlah operator pada pelaksanaan SIMGAKIN masih kurang karena Bappeda hanya memiliki tiga staf dan ketiganya tidak memiliki latarbelakang pendidikan IT (*Information and Technhnology*). Sebaiknya Bappeda perlu menambahkan minimal satu operator yang dikhususkan untuk mengelola dan mengembangkan *website* SIMGAKIN

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Database warga miskin yang menggunakan bentuk *relation model* divisualisasikan ke dalam bentuk tabel. Sebaiknya Bappeda perlu melakukan perekrutan SDM dengan beberapa syarat tertentu, yaitu menguasai *microsoft excel* dikarenakan data-data warga miskin disusun dalam bentuk tabel.

Selain itu SDM juga dituntut untuk berkinerja tinggi dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian untuk menciptakan SDM yang berkualitas sebaiknya Bappeda perlu mengadakan pelatihan secara rutin dan berkala yaitu sekitar dua kali dalam setahun dengan tujuan agar para pegawai dapat lebih mengembangkan layanan SIMGAKIN yang berbasis *website*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi.(2002).Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.Jakarta:PT.Rineka Cipta
- Afifuddin, dan Saebani, Beni A.(2009).Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung:CV.Pustaka Setia
- Bungin, Burhan.(2003).Analisis Data Penelitian Kualitatif.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada
- Davis, Gordon B.(1998).Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen.Jakarta:PT.Pustaka Binaman Pressindo
- Handoko, Hadi T.(2009).Manajemen.Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta
- Indrajit, Richardus Eko.(2004).Electronic Government (Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital).Yogyakarta:Andi
- Kerlinger, Fred N.(1990).Asas-Asas Penelitian Behavioral.Yogyakarta:Gadjah Mada University Press
- Kimorotomo, Wahyudi dan Margono, Agus S.(2001).Sistem Informasi Manajemen.Yogyakarta:Gajah Mada University Press
- Moekijat.(2005).Pengantar Sistem Informasi Manajemen.Bandung:Mandar Maju
- Moleong, Lexy J.(2010).Metodologi Penelitian Kualitatif.Bandung:PT.Remaja Rosdakarya
- Pasolong,Harbani.(2007).Teori Administrasi Publik.Bandung:Alfabet
- Purwanto, Erwan A dan Sulistyastuti, Dyah R.(2007).Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial.Yogyakarta:Gava Media
- Salusu, J.(2005).Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit.Jakarta:PT.Gramedia Widiasarana
- Sangarimbun, Masri dan Effendi, Sofian.(1989).Metode Penelitian Survai.Jakarta:PT.Pustaka LP3ES Indonesia
- Sutabri, Tata.(2005).Sistem Informasi Manajemen.Yogyakarta:Andi
- Sutanta, Edhy.(2003).Sistem Informasi Manajemen.Yogyakarta:Graha Ilmu
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S.(2004).Metodologi Penelitian

Sosial.Jakarta:PT.Bumi
Aksara

Winarno, Wahyu.W.(2006).Sistem
Informasi
Manajemen.Yogyakarta: UPP
STIM YKPN

WEBSITE

<http://simgakin.semarangkota.go.id/>

<http://www.babelprov.go.id/content/dinas-komunikasi-dan-informatika>

UNDANG-UNDANG

Intruksi Presiden No.3 Tahun 2003
tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan E-
Government

Peraturan Daerah Kota Semarang
No.4 Tahun 2008 tentang
Penanggulangan Kemiskinan di Kota
Semarang

Peraturan Walikota Semarang
Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang
Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan Kota Semarang